

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pengujian Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo ditemukan bahwa untuk Kabupaten Gorontalo, potensi pertumbuhan pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pajak daerah tahun 2010-2014, hal ini karena adanya keselaran perkembangan antara potensi pertumbuhan pajak penerangan jalan dengan efektivitas pajak daerah. Sedangkan untuk Kota Gorontalo, potensi pertumbuhan pajak penerangan jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pajak daerah periode 2010-2014. Hal ini karena perkembangan potensi pajak penerangan jalan tidak diikuti dengan perkembangan efektivitas pajak daerah.

5.2 Saran

Adapun saran yang disajikan peneliti dengan melihat hasil penelitian yang ditemukan yakni sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Gorontalo sebaiknya terus meningkatkan pengawasan bagi petugas yang melakukan pengutan pajak terutama dalam hal pajak penerangan jalan yang cenderung kurang efektif.
2. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten dan Kota Gorontalo tidak hanya berfokus pada penerimaan pajak yang berasal dari pajak penerangan

jalan. Komponen pajak daerah lainnya sangatlah penting diantaranya pajak hotel dan pajak restoran.

3. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya mengembangkan variabel penelitian ini dengan menambahkan komponen-komponen lain dari pajak daerah yang dapat mempengaruhi efektivitas pajak daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan Malahayu SP. *Menejemen (Dasar, Pengertian, dan Masalah)*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indrakusuma, Ariyani. 2011. Potensi Penerimaan Dan Efektifitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Semarang. *Skripsi S1* Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. (<http://eprints.undip.id>, diakses 2 November 2011).
- Ismartani (2003) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di DKI Jakarta. *skripsi S1*
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No 10 tahun 2002
- Mahmudi, 2010, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Edisi Revisi 2008. Andi : Yogyakarta.
- Nurrohman Alfian, 2010. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak daerah di kota surakarta (tahun 1994-2007). *Skripsi S1*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Pangastuti (2013) analisis efisiensi dan efektivitas penerimaan Pajak daerah kota surakarta, *Skripsi s1* fakultas ekonomi jurusan akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001. Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan.
- Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 17 tahun 2011
- Rapina (2006) Analisis Hubungan Pajak Penerangan Jalan terhadap Penerimaan Pajak Daerah 2004-2006.
- Sedarmayanti, 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung : Rafika Aditama.

- Sekaran, Uma. 2013. *Metode Penelitian Untuk Bisnis Buku 1 Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwarno Agus Endro dan Suhartiningsih. (2008:vol 7) *Efektifitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Widarjono, Agus, Ph.d, 2013. *Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya*. Edisi Keempat, Penerbit : UPP Stim YKPN.
- Yani Ahmad, SH., MM., AK. 2002. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. PT RajaGrafindo